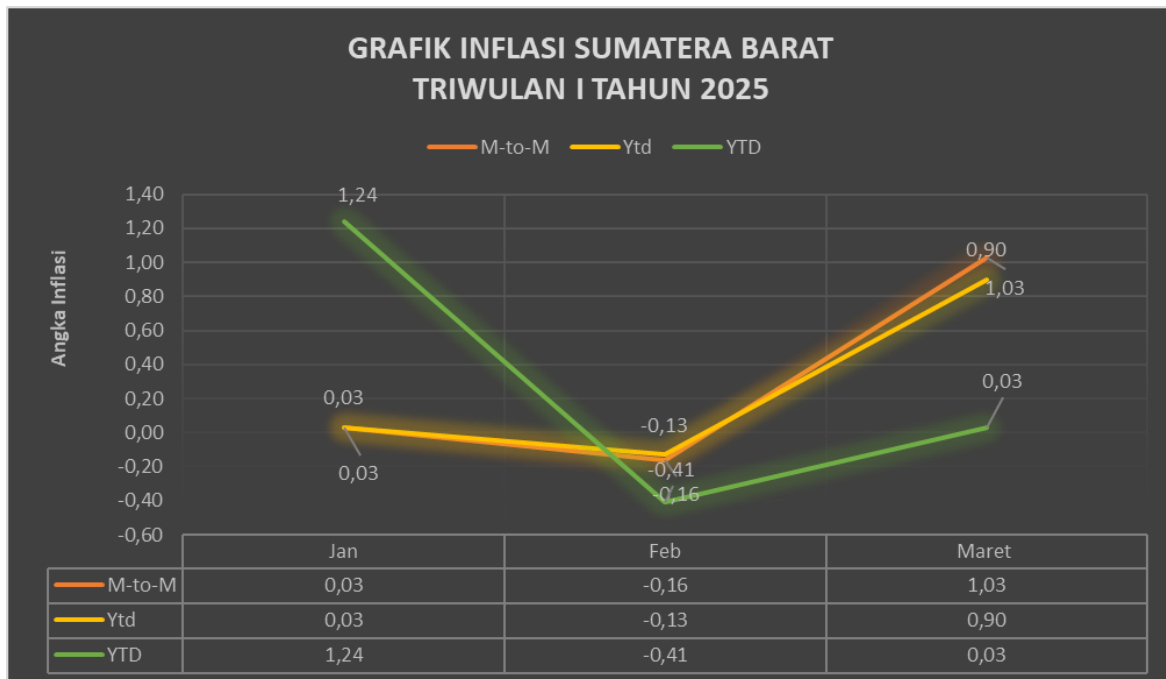


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Januari 2025, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 0.03% (mtm), yang disumbang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau (3,65%), serta kelompok transportasi (0,62%). Kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan komoditas penyumbang inflasi adalah cabai merah (0,82%), Cabe hijau (0,04%), cabe rawit, (0,04%) Bawang merah (0,15%), santan segar (0,03%), daging ayam ras (0,04%), sedangkan komoditas penghambat inflasi adalah tarif listrik (-1,37%), tomat (-0,03%), jengkol (0,02%), Buncis (-0,01%) dan bahan bakar rumah tangga (-0,01%). Adapun secara tahunan inflasi Januari 2025 sebesar 1,24 % (YoY), lebih tinggi dibanding inflasi Desember 2024 yakni sebesar 0,89% (yoy).
2. Februari 2025, Sumatera Barat mengalami deflasi sebesar -0,16%(mtm) terjadi perlambatan laju inflasi (disinflasi) dari bulan sebelumnya yakni 0,03% (mtm) dengan kelompok penyumbang deflasi adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar Rumah Tangga sebesar -1,74% serta makanan dan minuman tembakau sebesar (-0,11). Adapun penyumbang inflasi bulanan adalah cabe merah (0,13 %), emas perhiasan (0,09 %), Tarif Air Minum PAM (0,06 %), cabe rawit (0,06 %), Kontrakan rumah (0,05%), Iuran pembuangan sampah dan ikan kembung/ikan gembolo/ikan aso aso masing-masing sebesar 0,03%) serta kentang, bensin dan kelapa masing masing sebesar (0,02%). Sedangkan secara tahunan Sumatera Barat juga mengalami deflasi sebesar -0,09% (yoy) lebih rendah dari Januari 2025 yakni sebesar 1,24% (yoy).
3. Maret 2025, Sumatera Barat inflasi sebesar 1,03% (mtm) mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya dimana pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,16%(mtm). Adapun penyumbang inflasi pada bulan Maret adalah Perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1%, kelompok transportasi sebesar 1,50% dan penyediaan makanan dan minuman/Restoran sebesar 1,45%. Inflasi bulan Maret di dorong oleh kenaikan Tarif Listrik, Kelapa, Santan Segar, Angkutan Antar Kota, Kentang, Udang Basah, Daging ayam ras dan kontrak rumah. Kenaikan beberapa komoditas tersebut diatas sebagian besar disebabkan karena tingginya permintaan pada momentum perayaan hari besar keagamaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan tarif listrik karena berakhirnya masa diskon tarif listrik. Sedangkan secara tahunan pada Maret 2025 mengalami deflasi 0,30 (yoy) lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yakni sebesar 0,09% (yoy).

Berikut fluktuasi inflasi Sumatera Barat Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini, baik secara bulanan (mtm), tahunan (yoy) dan tahun berjalan (ytd), sebagai berikut :



## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Selama triwulan I realisasi inflasi Sumatera Barat sangat berfluktuasi dengan komoditi penyumbang inflasi antara lain cabai merah, cabe hijau, cabe rawit, bawang merah, santan segar, daging ayam ras, tarif dan kenaikan tarif listrik, kelapa, santan segar, angkutan antar kota, kentang, udang basah, daging ayam ras dan kontrak rumah. Adapun penyebab kenaikan inflasi pada triwulan I didorong oleh kenaikan harga dari kelompok volatile foods, karena tingginya permintaan dimana pada triwulan I bertepatan dengan momentum hari besar keagamaan nasional yakni hari raya idul fitri 1445, sedangkan dari kelompok harga yang ditetapkan pemerintah dimana masa berlangsungnya dan berakhirnya diskon kenaikan tarif Listrik pada masa triwulan I tahun 2025.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan agar inflasi tetap terjaga, tim pengendalian inflasi Sumatera Barat selama triwulan I tahun 2025 telah melakukan berbagai upaya diantaranya sebagai berikut :

### 1. Keterjangkauan Harga

Melaksanakan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan kegiatan lainnya untuk menjaga keterjangkauan harga pangan serta memperkuat komunikasi bersama stakeholders terkait untuk meningkatkan kerjasama antar Kab/Kota yang merupakan daerah produsen komoditi.

### 1. Ketersediaan Pasokan

Memitigasi resiko jangka pendek dan jangka menengah terhadap ketersediaan

1. pasokan dan kelancaran distribusi pangan termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 2025
2. Penguatan Manajemen stok dan kemandirian pangan Kota Padang dan Kota Bukittinggi untuk memenuhi permintaan tinggi yang terjadi siklikal pada periode tertentu.
3. Penguatan data produksi dan prognosa produksi bahan pangan tiga bulan kedepan menjelang Ramadan sampai Idulfitri Tahun 2025 dengan memetakan data pangan strategis per Kabupaten/Kota.

## 2. **Kelancaran Distribusi**

1. Intensifikasi sinergi pengendalian inflasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemantauan implementasi KAD khususnya antara daerah produsen dengan Kabupaten/Kota non produsen khususnya kota sampel IHK, untuk memastikan kecukupan stok
2. Melakukan kerjasama antar daerah, intervensi harga melalui TTIC bersama Bulog ke daerah yang kekurangan pasokan berdasarkan pemetaan data pangan strategis per Kabupaten/Kota

### 1. **Komunikasi Efektif**

1. Meningkatkan komunikasi efektif kepada masyarakat melalui media massa di berbagai kanal sebagai upaya pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat.
2. Replikasi Program pengendalian Inflasi yang telah berhasil dilakukan seperti bantuan operasional bajak sawah dan asuransi pertanian-peternakan di Kabupaten Tanah Datar.
3. Melibatkan nagari berbasis pemberdayaan generasi muda dapat mendorong petani muda inovatif dan berkelanjutan.
4. Pelaksanaan High Level Meeting TPID se Sumatera Barat pada tanggal 11 Maret 2025
5. Menetapkan keputusan Gubernur Nomor 500-39-2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian inflasi daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2025.
6. Menerbitkan Surat Gubernur Nomor 500/85/I/Ro-Eko/2025 perihal Pengendalian Inflasi kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat selaku Ketua TPID Kab/Kota.
7. Menerbitkan Surat Gubernur Nomor 500/117.a/II/Ro-Ekosetda/2025 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat
8. Menerbitkan Surat Gubernur Nomor 500/124/III/Ro-Eko.Setda/2025 perihal Rencana Aksi Pengendalian Inflasi HKBN 2025 kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat dan Kepala OPD/Instansi terkait di Provinsi Sumatera Barat
9. Menyampaikan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/124/Ro-Eko/Setda/KE/III/2025 perihal penyampaian Dokumen Kebijakan Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Menjaga Stabilisasi Harga pada Bulan Ramadan serta Idul Fitri 2025 kepada Ketua Tim Sekretariat Pengendalian Inflasi Pusat Kemenko Perekonomian RI dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Bebagai kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti pada Triwulan I tahun 2025 diantaranya rapat

teknis pengendalian inflasi, High Level Meeting, Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh Kemendagri dan beberapa kegiatan lainnya dalam menyambut ramadhan dan idul fitri seperti gerakan pangan purah, sidak pasar, kunjungan ke gudang bulog dan sebagainya. Berbagai kegiatan tersebut diatas dalam rangka upaya dan langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengendalian inflasi pada periode triwulan I terutama menghadapi ramadhan dan idul fitri 1446 H.

Periode triwulan I tahun 2025 menunjukkan dinamika inflasi Sumatera Barat yang relatif **terjaga dalam batas aman**, walaupun terdapat fluktuasi harga pada komoditas pangan dan energi rumah tangga. Tingkat inflasi secara year-on-year bergerak dari **1,24% di Januari, turun ke -0,09% pada Februari (deflasi)**, lalu **menguat kembali menjadi 0,30% pada Maret**.

Kondisi ini tidak terlepas dari kerja aktif **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** Provinsi Sumatera Barat yang secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi berbasis **empat pilar utama 4K: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif**.

## **Perkembangan Inflasi Bulanan**

### **1. Januari 2025 - Inflasi 1,24% (y-on-y)**

- Penyumbang utama inflasi: beras, emas perhiasan, cabai merah, rokok, dan minyak goreng.
- Kebijakan TPID:
  - Gelar *Pasar Murah* di wilayah rawan tekanan harga (Padang, Bukittinggi, Dharmasraya).
  - Koordinasi dengan Bulog untuk menjaga **stok beras dan minyak goreng**.
  - Pemantauan harga harian melalui **Sistem Informasi Harga Pangan (Sihati)**.

### **2. Februari 2025 - Deflasi -0,09% (y-on-y)**

- Deflasi disebabkan oleh penurunan tarif listrik, cabai merah, dan telur ayam.
- Kebijakan TPID:
  - Intensifikasi **Operasi Pasar dan Sidak Pasar** bersama Satgas Pangan.
  - Penyaluran bantuan beras SPHP dan LPG bersubsidi secara merata ke daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
  - Koordinasi lintas sektor untuk kelancaran distribusi dari sentra produksi ke konsumen.

### **3. Maret 2025 - Inflasi 0,30% (y-on-y)**

- Kenaikan harga terutama pada jasa pribadi, pendidikan, dan transportasi.
- Komoditas pangan masih relatif stabil bahkan cenderung turun.
- Kebijakan TPID:
  - Mendorong kerjasama antar daerah (KAD) untuk pasokan pangan strategis (cabai, beras, telur).
  - Pelaksanaan **Gerakan Tanam Cabai Serentak** oleh PKK dan petani lokal.
  - Sosialisasi melalui media dan dialog publik dalam rangka edukasi harga dan pola konsumsi masyarakat.

## **5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

### **1. Ketersediaan Pasokan**

Menjaga dan menjamin kecukupan stok barang kebutuhan pokok secara berkelanjutan :

- Peningkatan cadangan pangan strategis daerah, khususnya beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan telur;
- Pemanfaatan dan perluasan lahan pertanian produktif berbasis nagari, terutama untuk hortikultura (cabai, tomat, bawang);
- Gerakan Tanam Cabai Serentak melalui TP-PKK dan kelompok tani sejak Februari 2025 untukantisipasi HBKN (Ramadhan-Idul Fitri);
- Koordinasi rutin dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan beras SPHP dan bahan pokok bersubsidi;
- Pemberdayaan BUMNag dan koperasi pangan dalam menjaga cadangan stok di daerah pinggiran dan perdesaan/Jorong Nagari.

## **2. Keterjangkauan Harga**

Menjaga harga barang kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan :

- Gelar Pasar Murah dan Operasi Pasar di seluruh kabupaten/kota, terutama di Padang, Bukittinggi, Dharmasraya, Agam, dan Mentawai sejak Januari 2025 (Sumber: DJPh Kemenkeu & BI Sumbar);
- Subsidi harga komoditas pangan melalui sinergi dengan Pemkab/Pemko dan CSR swasta;
- Usulan penetapan harga dasar (*floor price*) untuk komoditas rentan seperti cabai dan telur guna melindungi petani sekaligus menstabilkan harga;
- Penguatan sistem distribusi LPG subsidi dan listrik berskala mikro, termasuk pengawasan distribusi ke rumah tangga miskin.

## **3. Kelancaran Distribusi**

Memastikan kelancaran alur distribusi dan logistik barang, dari sentra produksi hingga ke konsumen :

- Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dalam distribusi bahan pangan pokok (beras, telur, cabai, daging) antara Sumbar dan provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi (Sumber: antaranews.com);
- Optimalisasi kendaraan logistik TPID dan armada Tani Center untuk distribusi komoditas ke wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal);
- Perbaikan jalur distribusi desa-pasar dengan dukungan Dinas PUPR dalam rangka menekan ongkos logistik;
- Penyediaan pos pantau distribusi pangan dan bahan bakar di titik strategis seperti pelabuhan, terminal, dan perbatasan daerah.

## **4. Komunikasi Efektif**

Membangun persepsi dan ekspektasi masyarakat melalui penyebaran informasi yang tepat dan cepat :

- Sosialisasi edukatif tentang konsumsi bijak dan belanja rasional menjelang Ramadhan melalui media sosial, radio lokal, dan banner pasar.
- Aktivasi Sistem Informasi Harga Pangan (*SIHATI*) dan Dashboard TPID Online untuk

pelaporan harga harian secara real-time (Sumber: DJPb & Bank Indonesia)

- High Level Meeting (HLM) TPID pada Maret 2025 sebagai forum koordinasi dan konsolidasi kebijakan lintas sektor menjelang HBKN.
- Keterlibatan Forkopimda, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam menyampaikan informasi pengendalian inflasi ke masyarakat akar rumput.